

## **Dampak Pengangguran, Pendidikan Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 2014-2020**

**Sulasih<sup>1</sup>, Weni Novandari<sup>2</sup>, Arisa Findianingsih<sup>3</sup>**

*<sup>1,3</sup>Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

*<sup>2</sup> Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*

*Correspondence: [sulasih@gmail.com](mailto:sulasih@gmail.com)*

### **Abstract**

Indonesia is developing countries. To become a developed country, needs to fix existing problems, especially economic problems. Economic problems are divided into 2 categories, namely micro and macro. One of the discussions in macroeconomic is related to poverty. The problem of poverty in Indonesia is an important problem to be addressed immediately because the percentage level of poverty in Indonesia is quite high and fluctuates. The rise and fall of the poverty level is related to several economic indicators, one of which is unemployment and education. In addition, poverty is also influenced by economic development indicators, including inflation. The purpose of this study is to determine the effect of unemployment, education, and inflation on poverty in Indonesia for periode 2014-2020 either partially or simultaneously. This type of research is a quantitative research because the data used is in the form of numbers. The data in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS). Sampling technique using saturated sampling technique. While the data analysis in this study used multiple regression analysis because the independent variables in this study were more than 2. The results of this study indicated that the variables of unemployment and inflation have a positive and significant effect on poverty in Indonesia for the period 2014-2020. While the education variable has no effect on poverty in Indonesia for the period 2014-2020. Then simultaneously, the variables of unemployment, education, and inflation have a positive and significant effect on poverty in Indonesia for the period 2014-2020.

**Keywords:** Education; Inflation; Poverty; Unemployment

## Abstrak

Indonesia merupakan negara berkembang. Untuk menjadi negara maju, perlu memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada, terutama masalah perekonomian. Masalah perekonomian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu mikro dan makro. Salah satu pembahasan dalam ekonomi makro yaitu terkait kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang penting untuk segera di atasi karena tingkat persentase kemiskinan di Indonesia cukup tinggi dan berfluktuasi. Naik turunnya tingkat kemiskinan ini berkaitan dengan beberapa indikator ekonomi salah satunya yaitu pengangguran dan pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh indikator ekonomi pembangunan, di antaranya adalah inflasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengangguran, pendidikan, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020 baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena data yang di gunakan berbentuk angka. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Sedangkan untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena variabel independen pada penelitian ini jumlahnya lebih dari 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran dan inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020. Sedangkan variabel pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020. Kemudian secara simultan, variabel pengangguran, pendidikan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020.

**Kata Kunci:** Inflasi; Kemiskinan; Pengangguran; Pendidikan

---

## Pendahuluan

Menurut (Daton, 2020), Indonesia masuk dalam salah satu negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada, terutama masalah ekonomi. Masalah perekonomian di Indonesia ini terdiri dari permasalahan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro ini menjadi bagian dari salah satu ilmu ekonomi yang membahas masalah perekonomian secara menyeluruh atau dalam ruang

lingkup besar. Di dalam ekonomi makro ini terdapat variabel-variabel yang menjadi pokok pembahasan, di antaranya yaitu kemiskinan, pendapatan nasional, investasi nasional, tingkat harga-harga umum, tingkat bunga, neraca pembayaran (*export* dan *import*) dan lain-lain (Putong, 2003: 145).

Sebagai negara berkembang, masalah kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah umum yang di hadapi (Daton, 2020). Karena tingkat persentase kemiskinan di Indonesia cukup tinggi dan pergerakan persentasenya cenderung berfluktuasi. Sampai dengan tahun 2019, urutan peringkat tingkat kemiskinan negara Indonesia di Asia Tenggara masih kalah dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Databoks, 2021). Kemiskinan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan yang sering di kaitkan dengan ketidakmampuan di sisi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup penting untuk segera di selesaikan, terutama bagi negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk padat seperti Indonesia. Karena keberhasilan atau kegagalan pembangunan ekonomi suatu negara dapat di lihat dari perkembangan tingkat kemiskinannya (Primandari, 2018).

Menurut data yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) persentase kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2020 mengalami fluktuatif dan setiap provinsi berbeda-beda. Di tahun 2014-2020 provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi jika di bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dengan persentase tingkat kemiskinan berada di atas 25%. Sedangkan provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019 memiliki tingkat persentase kemiskinan terendah di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Untuk tahun 2020, persentase kemiskinan terendah terjadi di provinsi Bali (BPS, 2021). Naik turunnya persentase kemiskinan ini berkaitan dengan beberapa indikator ekonomi. Diantaranya berkaitan dengan masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan kemiskinan (Harlik dkk, 2013). Pengangguran merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya ketimpangan antara jumlah para pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pendidikan dapat di artikan sebagai segala pengalaman belajar yang terjadi pada segala lingkungan

dan sepanjang hidup. Pendidikan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu, serta adanya perubahan tingkah laku, sikap, dan kepribadian individu ke arah yang lebih baik. Sedangkan kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Maunah, 2009: 1-37).

Selain variabel tersebut, kemiskinan juga dipengaruhi oleh indikator ekonomi pembangunan di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pembangunan manusia (Padambo dkk, 2021). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu di upayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan. IPM yang tinggi seharusnya mengindikasikan masyarakat hidup sejahtera (Padambo dkk, 2021).

Menurut (Harlik dkk, 2013) salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pengangguran. Pengangguran dapat di artikan sebagai seseorang yang termasuk pada angkatan kerja karena sudah mencapai umur kerja serta aktif mencari pekerjaan, akan tetapi belum memperoleh pekerjaan (Zakaria, 2009: 68). Menurut (Pujoalwanto, 2014: 109) pada umumnya pengangguran terjadi karena adanya ketimpangan antara jumlah para pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran akan menyebabkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang sudah di capai, dimana semakin turunnya tingkat kemakmuran, ini akan menyebabkan masalah lain yaitu terkait kemiskinan (Sukirno, 2005: 87).

Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) persentase pengangguran provinsi di Indonesia periode tahun 2014-2020

mengalami fluktuatif dan setiap provinsi nilainya berbeda-beda. Tahun 2014-2015 provinsi Maluku memiliki persentase tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, tahun 2016 provinsi Banten yang memiliki tingkat persentase pengangguran tertinggi, untuk tahun 2017 provinsi Maluku kembali memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Sedangkan tahun 2018-2019 tingkat persentase tertinggi terjadi lagi pada provinsi Banten, dan tahun 2020 terjadi pada provinsi DKI Jakarta. Tingkat persentase pengangguran terendah di Indonesia tahun 2014-2019 terjadi pada provinsi Bali dan di tahun 2020 provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat persentase pengangguran terendah di bandingkan provinsi lain di Indonesia (BPS, 2020).

Menurut penelitian (Syafrina dan Pratama, 2020) yang berjudul “Pengaruh PDRB dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005-2019” variabel pengangguran menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian lain yang di lakukan oleh (Gebila dan Wulandari, 2020) dengan judul “Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bangka tahun 2009-2018” menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Indikator lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Menurut Redja Mudyahardjo (2001:3) pendidikan bermakna sebagai segala pengalaman belajar yang terjadi pada segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dimana dalam hal ini pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu, serta adanya perubahan tingkah laku, sikap, dan kepribadian individu ke arah yang lebih baik (Maunah, 2009: 1–37). Menurut (Amalia, 2012) pendidikan di definisikan sebagai jembatan menuju arah masa depan suatu bangsa. Seseorang di haruskan mempunyai pendidikan setinggi-tingginya supaya kualitas sumber daya manusia semakin baik dan bisa mendapatkan pekerjaan juga bisa bersaing dalam pekerjaannya (Nursalim, 2018). Saat seseorang bekerja dan mendapatkan gaji, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengurangi tingkat kemiskinan (Azizah dkk, 2018).

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat menggunakan indikator rata-rata lama seseorang bersekolah. Rata-rata lama sekolah dapat di artikan dengan jumlah tahun

yang di gunakan seseorang dalam menempuh pendidikan formal (BPS, 2020). Menurut model Mincer yang di kenal dengan nama persamaan gaji Mincer (*Mincerian Wage Equation*), perubahan gaji atau pendapatan seseorang selain dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman yang di terima, juga dipengaruhi oleh lamanya durasi bersekolah yang di terima. Hal yang menarik dari model ini yaitu lamanya waktu yang di habiskan seseorang dalam bersekolah menjadi kunci utama pendapatan. Semakin lama seseorang bersekolah berarti semakin tinggi pendidikan seseorang, ini mempengaruhi pendapatan yang di terima dapat semakin meningkat, pendapatan yang meningkat ini bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan, sehingga bisa mengurangi jumlah kemiskinan (Azhar dkk, 2018).

Menurut data, rata-rata lama sekolah tahun 2014-2020 selalu mengalami kenaikan. Untuk rata-rata lama seseorang bersekolah sekolah tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta yaitu di atas angka 10 dan rata-rata lama sekolah terendah adalah terjadi di provinsi Papua yaitu masih berada di bawah angka 7 (BPS, 2020). Rata-rata lama sekolah penduduk provinsi di Indonesia sebagian besar masih berada di kisaran angka 8 (setara dengan kelas 2 SMP), hanya beberapa provinsi saja yang memiliki rata-rata lama sekolah sudah berada di angka lebih dari 9. Hal itu menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia masih rendah, karena berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 2008 terkait wajib belajar di negara Indonesia yaitu 12 tahun (Darmaningtyas, 2011).

Menurut jurnal penelitian (Agustina dkk, 2019) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh” variabel tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Azizah dkk, 2018) dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur” variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi berbeda lagi pada penelitian yang di lakukan oleh (Giovanni, 2018) dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di

Pulau Jawa Tahun 2009-2016” yang menunjukkan adanya variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Indikator lain yang berpengaruh juga terhadap kemiskinan yaitu inflasi. Inflasi bisa di artikan sebagai proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus (Putong, 2003: 254). Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, dimana inflasi menunjukkan adanya ketidakstabilan perekonomian, laju pertumbuhannya selalu di usahakan untuk tetap rendah dan stabil agar tidak menyebabkan penyakit ekonomi makro (Ningsih dan Andiny, 2018). Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat yang mengakibatkan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar, dimana akibatnya nanti bisa berdampak pada meningkatnya kemiskinan (Padambo dkk, 2021). Selain inflasi yang tinggi, tingkat inflasi yang berfluktuasi juga menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di Indonesia (Daton, 2020).

Berdasarkan yang diperoleh dari BPS tingkat inflasi periode tahun 2014-2020 mengalami fluktuasi dan nilainya berbeda-beda tiap provinsi. Tingkat inflasi tertinggi pada periode tahun 2014-2020 terjadi di tahun 2014 pada provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 11,58%. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 di ada provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 0,6% dan 0,61% (BPS, 2020). Meskipun tingkat inflasi Indonesia cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya dan masih tergolong inflasi ringan, karena sebagian besar provinsi di Indonesia besar tingkat inflasinya masih di bawah 10% (Suparmoko dan Sofilda, 2014: 189). Dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.124/PMK.010/2017 tanggal 18 September 2017 terkait sasaran inflasi tahun 2019-2021, sasaran inflasi yang di tetapkan Pemerintah untuk periode 2019-2021 masing-masing sebesar 3,5%, 3%, dan 3%, dan sebagian provinsi di Indonesia telah memenuhi sasaran tersebut, tetapi tingkat inflasi di Indonesia masih lebih tinggi jika di dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan pada tahun 2014 inflasi indonesia berada di urutan tertinggi pertama di kawasan Asia Tenggara (BI, 2021).

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Daton, 2020) dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Periode 2010-2017” variabel inflasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi menurut penelitian lain yang di lakukan oleh (Widiastuti and Kosasih, 2021) yang berjudul “Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia” dimana adanya variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini juga berdasarkan adanya fenomena gap dimana tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2015 di provinsi Jambi dan Maluku, 2016 di provinsi Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua, 2017 di provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, 2018 di provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara mengalami penurunan tetapi tingkat kemiskinannya meningkat. Begitu juga tahun 2015 di provinsi Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat, tahun 2016 di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, tahun 2017 di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Papua Barat, tahun 2018 di provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat, tahun 2019 di provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua, tahun 2020 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah tingkat penganggurannya mengalami kenaikan, tetapi tingkat kemiskinannya mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori (Sukirno, 2005: 87) yang mengatakan bahwa peningkatan pengangguran akan menyebabkan masalah lain yaitu adanya kenaikan tingkat kemiskinan.

Pada variabel pendidikan juga di temukan adanya fenomena gap dimana tingkat pendidikan di Indonesia tahun 2015 di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat,



Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dan Papua, tahun 2016 di provinsi Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua, tahun 2017 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, tahun 2018 di provinsi Sulawesi Barat dan Maluku Utara, tahun 2019 di provinsi Maluku Utara, dan tahun 2020 di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua tingkat pendidikannya meningkat, tetapi tingkat kemiskinannya juga mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh (Azhar dkk, 2018) dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, ini akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain pada variabel pengangguran dan pendidikan, pada variabel inflasi juga di temukan adanya fenomena gap dimana tingkat inflasi di Indonesia tahun 2015 di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dan Papua, tahun 2016 di provinsi Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Papua, tahun 2017 di provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, tahun 2018 di provinsi Sulawesi Barat, tahun 2019 di provinsi Maluku Utara, dan tahun 2020 di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara

mengalami penurunan, tetapi tingkat kemiskinannya mengalami kenaikan. Begitu juga tahun 2016 di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali dan Sulawesi Tenggara, tahun 2017 di provinsi Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, tahun 2018 di provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, tahun 2019 di provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, dan tahun 2020 di provinsi Kalimantan Barat tingkat inflasinya mengalami kenaikan, tetapi tingkat kemiskinannya menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori (Padambo dkk, 2021) yang menyatakan bahwa peningkatan kemiskinan di sebabkan adanya kenaikan tingkat inflasi.

## **Telaah Literatur**

### **Kemiskinan**

Berdasarkan pendapat Emil Salim, dalam (Zakaria, 2009: 94) kemiskinan di artikan sebagai keadaan dimana pendapatan seseorang ini tidak mampu di gunakan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Menurut (Bhinadi, 2017: 9), kemiskinan menggambarkan suatu keadaan dimana kebutuhan dasar manusia tidak bisa terpenuhi. Menurut Emil Salim dalam (Zakaria, 2009: 95) ciri-ciri penduduk miskin yang sesuai dengan ketentuan Bank Dunia yaitu tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah yang cukup, mereka tidak bisa memperoleh aset produksi dengan keterampilan mereka sendiri, tingkat pendidikannya rendah, sebagian besar tidak lulus SD (Sekolah Dasar), mereka tinggal di pedesaan tetapi tanahnya terbatas dan mereka tinggal di perkotaan tetapi tidak memiliki keterampilan yang memadai.

### **Pengangguran**

Menurut (Putong, 2003: 264) pengangguran adalah orang yang sudah masuk usia kerja, dan mereka sedang aktif mencari kerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Sedangkan penduduk yang usianya sudah mencapai usia kerja serta sedang mencari pekerjaan di sebut sebagai angkatan kerja. Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 usia produktif untuk bekerja yaitu usia 15-64 tahun. Dampak dari pengangguran yaitu

berkurangnya pendapatan yang di miliki oleh masyarakat, dimana hal tersebut menyebabkan masalah lain yaitu pada tingkat kemakmuran atau kesejahteraan. Karena jika seseorang menganggur, mereka tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tingkat kemakmuran atau kesejahteraannya menurun dan mengakibatkan permasalahan lain yaitu kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat pengangguran tinggi akan mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia (Mulyadi, 2016).

Menurut (BPS, 2021), tingkat pengangguran merupakan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Untuk menghitung persentase tingkat pengangguran dapat di lakukan dengan:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

### **Pendidikan**

Menurut Redja Mudyahardjo pada (Maunah, 2009: 1) pendidikan bermakna sebagai seluruh pengalaman belajar yang terjadi pada semua lingkungan dan juga sepanjang hidup. Menurut pendapat (Amalia, 2012) pendidikan di definisikan sebagai jembatan menuju masa depan suatu bangsa. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pendidikan di definisikan sebagai usaha sadar serta terencana dalam menciptakan proses dan suasana belajar supaya peserta didik bisa meningkatkan potensi yang dimilikinya sehingga mereka bisa memiliki kepribadian baik, akhlak mulia, keterampilan, dan lain-lain. Manfaat Pendidikan Menurut (Nursalim, 2018: 30-37) pendidikan memiliki manfaat yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang taat dan bertakwa kepada Tuhan, mengangkat harkat, martabat dan juga derajat peserta didik, membiasakan peserta didik untuk berfikir kritis, menjadi sarana menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif, cerdas, dan lain-lain serta menciptakan peserta didik yang bermoral, berkarakter dan juga memiliki etika baik.

### **Inflasi**

Menurut (Putong, 2003: 254) inflasi bisa di artikan sebagai kenaikan harga dan barang secara terus menerus. Sedangkan menurut (Machmud dan Sujoni, 2016: 181) inflasi di definisikan sebagai gejala

ekonomi yang ditunjukkan dengan naiknya harga barang atau jasa secara umum juga cepat pada periode waktu tertentu. Metode perhitungan inflasi bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi metode yang sering digunakan yaitu menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu:

$$\text{Laju Inflasi} = \frac{(\text{IHK bulan ini} - \text{IHK bulan sebelumnya})}{\text{IHK bulan sebelumnya}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut (Zakaria, 2009: 66-67) untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Melalui kebijakan moneter, untuk mengatasi inflasi, bank sentral melakukan pengurangan jumlah peredaran uang. Instrumen yang sering digunakan yaitu dengan menaikkan suku bunga, sehingga bisa mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan juga mengurangi daya beli masyarakat. Dengan ini, laju inflasi dapat ditekan. Sedangkan melalui kebijakan fiskal ini, ada 2 instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah yaitu dengan mengurangi pengeluaran untuk belanja pemerintah, sehingga ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dimana daya beli masyarakat pun akan berkurang dan inflasi dapat ditekan. Selain mengurangi pengeluaran belanja pemerintah, instrumen lain yang dapat digunakan yaitu pajak. Melalui instrumen pajak ini, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak supaya bisa mengurangi uang yang beredar di masyarakat, sehingga daya beli masyarakat bisa berkurang dan bisa mengurangi inflasi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, dikarenakan data yang digunakan berbentuk angka (Sugiyono, 2019: 9). Populasi dan sample seluruh data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil dari website resminya mengenai pengangguran, pendidikan, inflasi dan kemiskinan di Indonesia. Teknik pengambilan data yaitu non probability sampling berupa sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh digunakan dalam penentuan sampel bila semua anggota

populasi di jadikan sampel (Martono, 2011: 78–79). Instrumen penelitian yang merupakan variabel independent yaitu tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, inflasi dan variabel dependent yaitu tingkat kemiskinan. Teknik analisis data yang di gunakan yaitu berupa analisis regresi berganda, dikarenakan variabel independen yang di gunakan pada penelitian ini lebih dari satu variabel (Sugiyono, 2015: 275).

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil Uji t atau yang di kenal dengan uji parsial di tujukan untuk memperoleh informasi apakah variabel independent (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pedoman dalam mengambil keputusan di lakukan dengan melihat nilai t-hitung dan nilai signifikasi (sig), jika nilai nilai t-hitung > t-tabel dan signifikasi < alpha (0,05), ini berarti bahwa secara parsial terdapat pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis di terim, seperti ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.** Hasil Uji t Coefficients

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig
Constant	-1,141	,778		-1,468	,145
Pengangguran	,088	,088	,040	2,326	,022
Pendidikan	,127	,086	,026	1,486	,140
Inflasi	,056	,026	,041	2,118	,036

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan besar nilai t-hitung > 1,6586 (t-tabel) dengan besar nilai signifikasi variabel X1,X2,X3 < 0,05 (alpha) sehingga bisa diartikan bahwa untuk semua variabel X1, X2, X3 berpengaruh positif terhadap Y. Sedangkan secara simultan secara keseluruhan variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent dimana hasilnya besar nilai F-hitung sebesar > 2,686 (F-tabel) dengan besar nilai signifikasi yaitu < 0,05 (alpha) seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.** Hasil Uji f ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	1237,566	3	309,392	909,066	,000
Residual	37,437	111	,340		

---

Total	1275,004	114
-------	----------	-----

---

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictor (Constant), Pengangguran, Pendidikan, Inflasi

### **Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10, pada variabel pengangguran besar nilai t-hitung 2,326 > 1,6586 (t-tabel) dan besar nilai signifikansi 0,022 < alpha (0,05). Hal itu menunjukkan bahwa pada variabel pengangguran nilai t-hitungnya > t-tabel, dan nilai signifikasinya < alpha (0,05), yang menunjukkan bahwa secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020, sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima.

Hasil itu menunjukkan bahwa semakin tinggi atau meningkatnya tingkat pengangguran ini juga akan meningkatkan tingkat kemiskinan, karena pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang, bahkan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai pendapatan, ketika pendapatan masyarakat terganggu hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang bisa menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sukirno, 2005: 87) bahwa pengangguran akan menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang, pendapatan masyarakat yang berkurang ini juga akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kemakmuran yang telah di capai, dimana semakin menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat akan menyebabkan masalah lain yaitu terkait kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Agustina dkk, 2019) yang menyatakan secara parsial pengangguran berpengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Widiastuti dan Kosasih, 2021) yang menyatakan bahwa secara parsial pengangguran berpengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

### **Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10, pada variabel pendidikan besar nilai t-hitung yaitu sebesar 1,486 < 1,6586 (t-tabel) dan besar nilai signifikansi 0,140 > alpha (0,05). Hal itu menunjukkan bahwa

pada variabel pendidikan nilai  $t$ -hitungnya  $< t$ -tabel, dan nilai signifikasinya  $> \alpha (0,05)$ , yang menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua ( $H_2$ ) di tolak.

Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan dimana dalam penelitian ini menggunakan indikator rata-rata lama sekolah, hasilnya tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Karena lamanya durasi sekolah (semakin tinggi tingkat pendidikannya) tidak menjamin seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tingkat kemiskinan bisa berkurang, tetapi keahlian dan pengalaman yang di miliki seseorang juga sangat berpengaruh. Karena di era perkembangan zaman sekarang ini yang sudah semakin maju, untuk mencari pekerjaan tidak cukup dengan pendidikan yang tinggi saja tetapi keahlian dan pengalaman juga sangat di butuhkan. Seperti yang di kemukakan pada model Mincer atau yang di kenal dengan nama persamaan gaji mincer (Mincerian Wage Equation) dalam (Azhar dkk, 2018) dimana perubahan gaji pendapatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lamanya durasi bersekolah tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan keahlian yang di miliki seseorang.

Selain itu, pendidikan yang tinggi (lamanya seseorang bersekolah) juga tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kemiskinan, karena walaupun tingkat pendidikan seseorang tinggi tetapi jika jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas dan juga mereka tidak mempunyai modal untuk berwirausaha itu juga tidak berpengaruh untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Akibatnya mereka tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi yang lebih mempengaruhi yaitu kesehatan. Karena dengan tingkat kesehatan yang tinggi, seseorang bisa bekerja seperti biasa sehingga bisa memperoleh pendapatan, tetapi jika tingkat kesehatannya rendah, mereka tidak bisa bekerja dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga kemiskinan meningkat. Seperti pada tahun 2020, dimana tahun tersebut merupakan awal negara Indonesia terkena dampak adanya pandemi Covid-19, yang

mengakibatkan tingkat kesehatan menurun drastis, dimana banyak sekali masyarakat yang sakit dan tidak bisa bekerja bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak memperoleh pendapatan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dimana pada tahun 2020, tingkat kemiskinan semua provinsi yang ada di Indonesia sebagian besar mengalami kenaikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini and Islamy, 2021) yang menyatakan bahwa kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Giovanni, 2018) yang menyatakan bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY).

### **Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10, pada variabel inflasi besar nilai t-hitung yaitu sebesar  $2,118 > 1,6586$  (t-tabel) dan besar nilai signifikansi sebesar  $0,036 > \alpha (0,05)$ . Hal itu menunjukkan bahwa pada variabel inflasi nilai t-hitungnya  $> t$ -tabel, dan nilai signifikasinya  $< \alpha (0,05)$ , yang menunjukkan bahwa secara parsial inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) di terima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut sesuai teori (Padambo dkk, 2021) bahwa inflasi yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan beli masyarakat yang mengakibatkan masyarakat sulit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dimana kedepannya bisa berakibat pada meningkatnya kemiskinan. Hasil penelitian tersebut juga sesuai penelitian (Daton, 2020) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros periode 2010-2017. Dan juga sesuai dengan penelitian (Padambo dkk, 2021) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel inflasi memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.



## Pengaruh Pengangguran, Pendidikan, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan nilai F-hitung sebesar  $909,066 > 2,686$  (F-tabel) dengan nilai signifikansi yaitu sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$ . Hal itu menunjukkan bahwa nilai F-hitungnya  $> F$ -tabel, dan nilai signifikasinya  $< \alpha (0,05)$  yang menunjukkan variabel pengangguran, pendidikan, dan inflasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020, dimana dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) di terima.

Hal itu juga sesuai dengan penelitian (Amalia, 2012) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel pengangguran, pendidikan, dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) periode tahun 2001-2010. Kemudian untuk memperoleh informasi seberapa besar pengaruh variabel pengangguran, pendidikan, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020 dapat dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R Square. Dalam penelitian ini, pada tabel 4.12 besar nilai Adjusted R Square adalah 0,970 (97%), artinya variabel pengangguran, pendidikan, dan inflasi dapat mempengaruhi variabel kemiskinan sebesar 97%, dan sisanya yaitu 3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020. Hal itu ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar  $2,326 > 1,6586$  (t-tabel) dan nilai signifikansi sebesar  $0,022 < \alpha (0,05)$ , dimana pada variabel pengangguran besar nilai t-hitungnya  $> t$ -tabel, dan besar nilai signifikasinya  $< \alpha (0,05)$  yang berarti hipotesis pertama ( $H_1$ ) di terima. 2) Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020. Hal itu ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar  $1,486 < 1,6586$  (t-tabel) dan nilai signifikansi sebesar  $0,140 > \alpha (0,05)$ , dimana pada variabel pendidikan besar nilai t-hitungnya  $< t$ -tabel, dan besar nilai signifikasinya  $> \alpha (0,05)$  yang berarti hipotesis kedua ( $H_2$ ) di tolak. 3) Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020. Hal itu di tunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar  $2,118 > 1,6586$  (t-tabel) dan nilai signifikasi sebesar  $0,036 < \alpha (0,05)$ , dimana pada variabel inflasi besar nilai t-hitungnya  $>$  t-tabel, dan besar nilai signifikasinya  $< 0,05$  yang berarti hipotesis ketiga ( $H_3$ ) di terima. 4) Pengangguran, pendidikan, dan inflasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode tahun 2014-2020. Hal itu di buktikan dengan F-hitung sebesar  $909,066 > 2,686$  (F-tabel), dimana nilai F-hitungnya  $>$  F-tabel, dan nilai signifikasinya  $< \alpha (0,05)$  yang berarti hipotesis keempat ( $H_4$ ) di terima.

### Bibliografi

- Agustina, E dkk. (2019). "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 4. No. 2: 265–283.
- Aini, L.N. dan Islamy, S.N. (2021). "Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia". *Journal of Economics Research and Policy Studies*. Vol. 1. No. 3.
- Al-Ghifari. (2000). *Analisis Teori Regresi: Teori kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Amalia, F. (2012). "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010". *Jurnal Econo Sains*. Vol. 10. No. 2: 12.
- Azhar, M, dkk. (2018). "Determinant Return to Education in Indonesia". *Jurnal Manajerial*. Vol. 3. No. 4: 18.
- Azizah, E.W, dkk. (2018). "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur". Vol.2. No. 1: 14.
- Berliani, K. (2021). "Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2020". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 6. No. 2: 11.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Case, K.E. dan Fair, R.C. (2004). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Kelima. Jakarta: PT Indeks Jakarta.

- Darlis, A. (2017). "Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal, dan Formal". *Jurnal Tarbiyah*. Vol. 24. No. 1: 86– 96.
- Darmaningtyas. (2011). *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS.
- Daton, S.R. (2020). "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros Periode 2010-2017". *Economics Bosowa Journal*. Vol. 6. No. 002: 14.
- Gebila dan Wulandari, A. (2020). "Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bangka tahun 2009-2018". *Jurnal Manajemen Kompeten*. Vol. 3. No. 2.
- Giovanni, R. (2018). "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016". *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 7. No. 1.
- Harlik, dkk. (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 1. No. 2: 12.
- Islami, N. dan Anis, A. (2019). "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 1. No. 3: 939–948.
- Lendentariang, D, dkk. (2019). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 19. No. 02.
- Machmud, M. dan Sujoni, N. (2016). *Teori Ekonomi Makro*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mardiatillah, R, dkk. (2021). "Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2015-2019". *Journal of Economics and Business Mulawarman University*. Vol. 18. No. 2.
- Martono, N. (2011). *Metode Peneliiian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ma'sumah, S. (2019). *Kumpulan Cara Analisis Data Beserta Contoh Judul dan Hipotesis Penelitian*. Banyumas: Rizquna.
- Maunah, B. (2009). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Misbahuddin dan Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi Ke-2*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyadi, M. (2016). "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat". *Jurnal Kajian*. Vol. 21. No. 3.

- Ningsih, D. dan Andiny, P. (2018). "Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol. 2. No. 1: 9.
- Nursalim. (2018). *Ilmu Pendidikan (Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Padambo, M.R, dkk. (2021). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 21. No. 05: 13.
- Primandari, N.R. (2018). "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 16. No. 1: 10.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia (Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putong, I. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro (Edisi 2)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholicha, A. dan Novandari, W. (2012). "Analisis Pengaruh Entertainment, Informativeness, Irritation, dan Credibility terhadap Advertising Value dan Consumers Attitude". *Jurnal Performance*. Vol. 15. No. 1.
- Sianturi, V.G. (2020). "Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2009-2017". *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*. Vol. 20. No. 2.
- Sugiyono. (2015). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2005). *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulasih. (2017). "A Study of Price Perception, Packaging, and Service Quality to Ward Consumers Interest in Purchasing Special Product of Bumiayu, Central Java". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 5. No. 1.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suparmoko dan Sofilda, E. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Tangerang: CV Wacana Mulia.
- Syafrina, D.N. dan Pratama, M.I. (2020). "Pengaruh PDRB dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005- 2019". *Journal of Trends Economics and Accounting Research*. Vol. 1. No. 1: 5.

- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Toda, H. (2016). "Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 7. No. 1.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Sembilan. United Kingdom: Erlangga.
- Usman, H. dan Akbar, P.S. (1996). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widiastuti, A.S. dan Kosasih. (2021). "Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 4. No. 1: 12.
- Zakaria, J. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persada (GP Press)